

BUDAYA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK POLITIK (STUDI KASUS ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA)

Iis Haryani^{*)}, Balqis Fahira Ninggrum^{*)}, Syarah Audia^{*)}, Nofrizal^{*)} Nodi Marefanda^{}**

^{**}) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

^{*)} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
nodimarefanda@utu.ac.id

Abstract

The Women are often used as political objects throughout the country to gain advantage in getting voice support to advance as representatives of the people or other political officials. This research is to analyze the culture of women as political object and want to know the factors that cause the influence of women is bigger when compared to men in West Aceh and Nagan Raya district. This research uses qualitative approach with descriptive type. The analysis is done by relying on the findings of data that have been collected and relevant information from the bibliography (secondary data). This study uses the theory of Gabriel A. Almond and Malinowsky theory. The results of the study found that in Aceh Barat District and Nagan Raya District, the perpetrators were always used as political objects in seeking support to gain power based on the parameters of Political Socialization, Political Recruitment, Political Communication and Political Culture. Factors that cause women as a political object are: Money Politic and Poverty, Lack of Political Education, Women as the Majority as well as the Conditions of a Patriarchal Society.

Keywords: Aceh Barat dan Nagan Raya, Budaya, Perempuan, Politik.

PENDAHULUAN

Politik secara umum sering didefinisikan sebagai ilmu dan sebagai seni maupun praktik tentang pemerintahan yang identiknyanya dengan kekuasaan yang terorganisir. Politik adalah unsur yang penting dalam pemerintahan suatu Negara. Politik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya, baik itu pertahanan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Konsep politik tersebut mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi juga pada masyarakat umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) poin (e) menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai salah satu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tentunya hal tersebut adalah konsep ideal suatu partai politik untuk membangun peradaban negara ini dengan melibatkan kaum hawa sebagai partner kerja dalam satu tim. Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana sistem demokrasi kekuasaan itu terletak pada tangan rakyat atau sering disebut dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. di dalam sitem demokrasi tentunya cara menentukan pemimpin itu di pilih langsung oleh rakyat pada pemilihan umum, dimana pemilihan umum ini sering kali para politikus-politikus memamfaatkan situasi dan kondisi demi tercapai nya tujuan yang identik dengan kekuasaan melalui pemilihan umum.

Secara garis besar pemilih pada pemilihan umum di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Di dalam praktik politik demokrasi negeri ini para kandidat mengandalkan suara perempuan menjadi senjata utama dalam berpolitik, para kandidat berusaha mempengaruhi semaksimal mungkin para kaum perempuan untuk tujuan mereka, karena suara kaum perempuan merupakan suara tetap dan kaum perempuan banyakan konsisten ketika menggunakan hak suaranya.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya merupakan salah satu basis politik partai lokal dan nasional yang mayoritas pemilihnya dari kaum perempuan. Hal tersebut memberikan ruang kepada para kandidat partai yang bertarung untuk maju sebagai perwakilan rakyat atau maju sebagai kepala daerah untuk memperebutkan suara mayoritas perempaan untuk memilih mereka. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, lebih banyak calon kandidat mendekati kaum perempuan daripada kaum laki-laki sebagai objek politik untuk memilih mereka, dan strategi yang dilakukan tersebut ternyata mampu memberikan angin segar kepada para kandidat yang tampil memperebutkan tampuk kepemimpinan. Kenyataan yang terjadi tersebut merangsang peneliti untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perempuan sebagai ojejek politik dan memberikan tandatanya bagi peneliti mengenai faktor-faktor pengaruh kaum perempuan lebih besar bila dibandingkan kaum laki-laki di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, memberikan semangat kepada peneliti untuk mengetahui mengenai perempuan yang selalu dijadikan sebagai objek politik.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis budaya perempuan sebagai objek politik dan ingin mengetahui faktor-faktor penyebab kaum perempuan sebagai objek politik lebih besar bila dibandingkan kaum laki-laki di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.

Rencana Pemecahan Masalah

Minilik pada latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rencana pemecahan masalah pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan mengumpulkan data-data sekunder dan data hasil interview yang mendalam dan selanjutnya dilakukan analisis dengan teori *Gabriel A. Almond* dan *teori Malinowsky*.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Budaya perempuan sebagai objek politik: Studi kasus di Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya ini dilakukan di Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya dengan durasi waktu kurang lebih 3 bulan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan teori yang digunakan adalah teori Gabriel Almond dan teori malinowsky.

Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian dengan menentukan informan kunci yaitu masyarakat khususnya kaum perempuan yang sudah mempunyai hak pilihnya dalam pemilukada. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggota Legislatif yang terpilih;
- b. Anggota partai;
- c. Masyarakat; dan
- d. KPU.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian budaya wanita sebagai objek politik di kabupaten aceh barat dan nagan raya yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan informan yang menerima tindakan, sedangkan data skunder yang berupa data dokumentasi. Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar, dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh budaya wanita sebagai objek politik. Peneliti melakukan penelitian dengan pedoman observasi yang telah ditetapkan (Arikunto, 2006).

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kondisi wanita yang selalu dijadikan sebagai objek politik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2005).

Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2002) analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. *Display Data*

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BUDAYA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK POLITIK

1. Sosialisasi Politik

Dalam kehidupan politik, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Budaya perempuan sebagai objek politik di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan raya tidak terlepas dari parameter sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai tertentu dalam menyampaikan dan merekrut perempuan sebagai partisipan yang pro atau loyal terhadap partai, berikut disajikan matriks Sosialisasi Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya

Tabel 1. Matriks Sosialisasi Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya

No	Sosialisasi Politik	Keterangan
1	Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya tidak dilakukan secara rutin dan ditetapkan waktunya melainkan jika ada kesempatan maka sosialisasi akan dilakukan. Namun kebanyakan sosialisasi dilakukan lebih dominan kepada kaum pria karena kaum perempuan kurang tertarik dengan hal-hal yang berbau politik.	Partai politik dalam melakukan sosialisasi lebih mengutamakan kaum pria karena kaum pria dikenal lebih mengerti terhadap perpolitikan. Namun untuk sosialisasi sebagai loyalis, hal tersebut lebih cenderung kepada kaum perempuan karena kaum perempaun dirasa lebih menurut dan mampu mempengaruhi keluarganya.
2	Sosialisasi mengenai perpolitikan sangat jarang dilakukan terhadap kaum perempuan karena kaum perempuan kurang begitu tertarik dengan politik. Terkecuali jika kaum perempuan diimingi dengan berbagai janji para kandidat yang maju ke pentas demokrasi, kebanyakan kaum perempuan akan mendukung kandidat tersebut.	

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

Di dalam kehidupan politik sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada

seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau perilaku sosialisasi politik.

2. Rekrutmen Politik

Perekrutan politik di Aceh Barat dan Nagan Raya yaitu berlangsung melalui seleksi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh suatu partai dan rekrutmen politik tersebut tidak hanya dilakukan untuk masuk ke partai tapi adajuga dilakukan hanya untuk memberikan/membantu partai agar banyak masyarakat meberikan suaranya kepada partai yang diusung. Berikut disajikan matriks Rekrutmen Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya.

Tabel 2. Matriks Rekrutmen Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya

No	Rekrutmen Politik	Keterangan
1	Perekrutan anggota partai dilakukan setiap tahun dan keterwakilan perempuan di setiap partai di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya selalu mencapai 30% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.	Keterwakilan kaum perempuan hanya memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 karena dalam kenyataan di lapangan perempuan hanya dijadikan sebagai objek politik belaka. Hal ini karena kaum perempuan dirasa belum mampu mengambil sebuah keputusan maupun suatu kebijakan.
2	Perekrutan loyalis dalam masa pileg dan pilkada biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum pemilihan dan yang direkrut kebanyakan memang dari kaum perempuan karena kaum perempuan sudah terbukti dapat mendulang suara dalam menarik ketertarikan masyarakat terhadap suatu kandidat.	Perekrutan yang dilakukan bukan hanya sebagi anggota parta melainkan adajuga loyalis seperti kaum perempuan yang dirasa mampu meberikan ketertarikan misalnya melalui tarik suara, pengaruh dan sebagainya.
3	Seleksi dalam rekrutmen hanya menjadi sebuah seremonial belaka, kenyataannya hampir sebagian besar dikarenakan faktor keluarga, pertemanan dan kebanyakan untuk posisi yang strategis di tubuh parta memang di dominasi kaum laki-laki	Perekrutan politik kebanyakan dilakukan secara subjektif, yaitu mengutamakan kerabat dan sahabat dan walaupun ada di luar itu hanya sebagian kecilnya dan kebanyakan bukan sebagi subjek tapi hanya dijadikan sebai objek politik semata.
4	Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan kepartaian menunjukkan kecenderungan upaya internalisasi demokrasi prosedural, namun hanya menyentuh jabatan puncak. Sedangkan jabatan lainnya kebanyakan melalui proses penunjukan secara langsung oleh pimpinan partai	Seharusnya sistem prekrutan di tubuh partai untuk setiap jabatan dilakukan secara objektif dengan mengedepankan asas profesionalitas dan intelektual kepartaian.
5	Keterwakilan kaum perempuan di bangku parelem	Rekrutmen politik yang dilakukan

	di Kabupaten Aceh Barat hanya 3 orang dari total 25 orang dan begitu juga untuk wilayah nagan raya hanya sekitar 2 Dari total 25 ini mengindikasikan bahwa kaum perempuan tidak benar-benar terwakilkan walaupun posisi perempuan di kedua kabupaten menjadi mayoritas daripada kaum laki-laki.	bukalah semata-mata untuk menaikan keikutsertaan dalam kanca perpolitikan, tapi hanya sekedar mengisi kekosongan atau memenuhi kuota dari perempuan, kenyataannya di kedua Kabupaten keterwakilan perempuan sangat sedikit.
--	---	---

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

Dalam rekrutmen politik seharusnya partai politik betul-betul harus melihat peluang kedepannya dalam kanca politik khususnya bagi kaum perempuan, rekrutmen secara rutin setiap tahunnya sangat diperlukan untuk efektifitas kinerja dan mampu bersaing di kanca politik, sehingga kader tercipta dengan pasti di setiap partai politik.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik yang dilakukan untuk mengaspirasikan kepentingan partai politik menjadi suatu daya tarik tersendiri bila dilakukan baik anggota partai kepada kaum pria maupun kaum perempuan kepada masyarakat karena komunikasi politik yang dilakukan kepada dan oleh kaum pria lebih mudah tercapaian. Berikut disajikan matriks Komunikasi Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya

Tabel 3. Matriks Komunikasi Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya

No	Komunikasi Politik	Keterangan
1	Dalam menyampaikan visi dan misi dari seorang calon anggota misalnya legislatif, lebih mudah dilakukan kepada kaum pria karena kaum pria di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya lebih mudah mengetahui mengenai perpolitikan yang terjadi dan ruang gerak pria jauh lebih besar daripada kaum perempuan.	Sistem komunikasi politik yang sudah dibangun selama ini di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya yang paling besar kepada kaum pria melalui berbagai media dan kegiatan, walaupun secara umum hal tersebut tidak kelihatan. Untuk kaum perempuan komunikasi politik dalam merekrut dukungan juga dilakukan, namun tidak seintens terhadap kaum pria karena kaum pria lebih mengetahui terkait masalah politik.
2	Komunikasi politik paling gencar dilakukan pada saat mendekati pileg dan pilkada.	
3	Kaum perempuan dalam komunikasi politik biasanya hanya berperan sebagai loyalis yang tidak duduk dikepartaian ataupun ada juga yang dikepartaian, namun sebagian kecilnya dan kebanyakan bukan di jabatan-jabatan strategis.	

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

4. Budaya Politik

Budaya politik menempatkan peran yang penting bagi seorang individu sebagai anggota komunitas politik dalam hal ini masyarakat atau bangsa. Dengan demikian, unit analisis dalam budaya politik adalah tingkah laku individu. Konsep budaya politik akan selalu berkaitan dengan sosialisasi politik sebagai upaya untuk mengetahui orientasi dari pemahaman politik masyarakat sehingga transfer nilai politik dapat diukur perkembangannya. Berikut disajikan matriks Budaya Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya

Tabel 4. Matriks Budaya Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya

No	Rekrutmen Politik	Keterangan
1	Perempuan yang memang sudah menjadi objek	Adanya pendekatan yang

2	<p>perpolitikan dari masa pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat dan bahkan dari sejak Indonesia merdeka, tetap saja dipandang dan dijadikan sebagai objek politik belaka.</p> <p>Penelitian dari berbagi informan yang dilakukan di lapangan menunjukkan kalau perempuan sebagai objek memang sudah mengakar rumput di masyarakat, perlu ada pendekatan yang komperhensif dan perubahan pola pikir sehingga perempuan tidak hanya dipandang dan dijadikan sebagai objek politik belaka.</p>	<p>dilakukan secara arif dan kontinyu untuk perubahan pola pikir jikalau budaya patriarki yang sudah mengakar rumput selama ini hanya mementingkan satu golongan saja sehingga hal tersebut perlu segera diatasi misalnya melalui pendidikan politik kepada kaum perempuan.</p>
---	---	---

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

B. FAKTOR-FAKTOR PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK POLITIK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA

1. *Money Politic* dan Kemiskinan

Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit, perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Dengan demikian para penguasa khususnya jabatan politik menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga Dalam dunia perpolitikan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Tabel 5. Matriks *Money politic* dan Kemiskinan

No	<i>Money politic</i> dan Kemiskinan	Keterangan
1	<p>Dikabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya <i>money politic</i> terjadi jauh sebelum pemilu berlangsung dikalangan kaum perempuan, <i>money politic</i> terjadi pada kaum perempuan begitu mudah diakibatkan kaum perempuan sangat mudah di pengaruh dan begitu cepat mempengaruhi orang di sekelilingnya.</p>	<p><i>money politic</i> ini terjadi setahun sebelum di selenggarakan pemilu, dimana pada masa-masa ini lagi kencar-kencarnya para politikus mencari dukungan dan suara yang pasti agar mereka dapat mengukur kekuatan untuk menjelang pemilu, padahal <i>money politic</i> tidak dibolehkan dalam undang-undang, tetapi hal ini terus dilakukan sehingga sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat walaupun permainan <i>money politic</i> dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan ada yang secara kasar yang nampak dilihat oleh masyarakat secara langsung, dalam permainan ini yang menjadi target utama ialah kaum perempuan dengan alasan suara kaum perempuan merupakan suara yang pasti dan mutlak yang dapat dipercaya sebagai kekuatan mereka.</p>
2	<p>Kemiskinan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya <i>money politic</i>, iming-iming memberi imbalan materi dapat dengan mudah mempengaruhi para pemilih, khususnya pemilih perempuan. Inilah yang mengakibatkan perempuan hanya dijadikan objek politik karena perempuan sangat mudah dipengaruhi.</p>	

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

Pada dasarnya money politik di lakukan jauh sebelum pemilu dilakukan itu bermaksud untuk mengikat para simpatisan dalam pentas demokrasi, hal ini menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, selain itu juga maksud dari money politik yang di lakukan jauh sebelum pemilu di laksanakan ialah menjadi tolak ukur bagi politikus untuk melihat kekuatan dan peluang meeka sehingga mereka mampu melihat kelemahan mereka agar cepat tertutupi dalam mencari suara.

Kebanyakan money politik di mainkan di kalangan kelompok-kelompok perempuan, sebab penyiraman pemahaman nya lebih mudah dan suara mereka lebih meyakinkan di bandingkan kaum lelaki, sebab kaum perempuan banyak membuat kelompok-kelompok pengumpulannya, sehingga mencari mereka pun begitu mudah untuk di jadikan sebagai objek politik.

2. Minimnya Pendidikan Politik

Dengan tercapainya kultur politik kemasyarakatan (*civil society*), maka dimasa yang akan datang akan mengantarkan Indonesia dan khususnya Kabupaten Aceh Barat dan Nagan raya pada proses pendewasaan demokrasi yang matang (*mature democracy*). Tentu saja semua itu membutuhkan proses gradual yang melibatkan kesadaran pada segenap lapisan masyarakat untuk dapat turut andil dalam proses stabilitas demokrasi, dan stabilitas demokrasi ini dapat terus berjalan dan berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kemajuanekonomi, dengan cara peningkatan kesadaran politik kemasyarakatan (Soeharto A, 2011). Pendidikan politik bagi kaum perempuan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak agar mampu berperan aktif dalam perpolitikan sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi denganbegitu akan lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena demokrasi dan politik dan pada endingnya kaum perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek politik semata melainkan sebagai subjek di kanca perpolitik. Berikut disajikan matriks Minimnya Pendidikan Politik Perempuan yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya

Tabel 6. Minimnya Pendidikan Politik Perempuan di Aceh Barat dan Nagan Raya

No	Minimnya Pendidikan Politik Perempuan	Keterangan
1	Hasil penelitian yang dilakukan selama penelitian memperlihatkan jikalau kaum perempuan di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya berkaitan dengan tingkat pendidikan politik memang masih sangat rendah, apalagi dalam pemberdayaan perempuan sehingga perlu dilakukannya pendekatan dalam hal pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk lebih memajukan kaum perempuan agar aspirasi dan tingkat keterwakilan kaum perempuan di kanca perpolitikan dapat lebih ditingkatkan.	kuota 30% yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang untuk semua partai di Aceh Barat dan Nagan Raya memang terpenuhi, tetapi dikarnakan minimnya pendidikan politik perempuan, mereka hanya direkrut untuk memenuhi syarat saja. Seharusnya pendidikan politik bagi kaum perempuan harus lebih ditingkatkan baik oleh partai politik maupun pemerintah.
2	Kesadaran politik dikalangan kaum perempuan aceh barat dan nagan raya sampai saat ini masih sangat kurang, hal tersebut dikarenakan kaum perempuan yang ada di kabupaten tersebut memandang kalau politik itu selalu identik dengan hal yang tidak baik atau memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak baik, sehingga kaum perempuan cenderung tidak begitu respect terhadap perpolitikan yang terjadi, apalagi dalam meningkatkan pendidikan politiknya.	Akibat kurangnya kesadaran dari mayoritas perempuan yang ada di Aceh Barat dan Nagan Raya dalam perpolitikan yang menjadikan dirinya hanya sebagai objek politik saja.

3	Dalam sistem perekrutan perempuan lebih mudah dari pada laki-laki.	Sehingga membuat sebagian kaum perempuan lebih banyak dijadikan sebagai alat untuk merekrut massa bagi partai dan sosialisasi bagi KPU, sehingga dibutuhkan pendidikan politik.
---	--	---

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

Pendidikan politik di kalangan kaum perempuan sangat begitu rendah, selain minimnya pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik nasional dan lokal terhadap kaum perempuan, keikutsertaan kaum perempuan dalam politik begitu susah sehingga mereka banyak yang tidak ingin tahu mengenai kondisi perpolitikan, dengan demikian para kaum perempuan begitu mudah pula untuk dijadikan sebagai objek politik, tetapi mereka secara spontan pula mengikuti jalannya perpolitikan itu diakibatkan mereka sangat mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi sehingga secara spontan mereka terpengaruh dalam rekrutmen politik.

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik bagi perempuan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Tentu saja ini merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Pemberdayaan perempuan bukan hanya bermakna mengembangkan potensinya, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kemampuan, semangat dasar dari pendidikan politik adalah mempersiapkan kader politik perempuan yang tangguh. pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, sangat penting guna meningkatkan peran politik perempuan.

3. Perempuan Sebagai Kaum Mayoritas

Salah satu faktor dari mayoritas adalah karena jumlah anggota grup yang banyak. Seiring dengan bertambah banyaknya anggota, maka *social influence* group tersebut semakin besar. Kebanyakan kaum minoritas sering mengalami kesulitan atau hambatan saat berhadapan dengan kaum mayoritas.

Saat ini perempuan menjadi kaum mayoritas, yang membuat perempuan berperan penting dalam politik. Dikarenakan pengaruh perempuan dalam hal mempengaruhi lebih besar daripada laki-laki,

No	Perempuan Sebagai Kaum Mayoritas	Keterangan
1	Kaum perempuan lebih mudah dipengaruhi daripada kaum laki-laki baik didalam partai maupun di pemerintahan.	Bisa kita lihat sebagai contoh dalam pemilihan umum misalnya wanita lebih mudah mempengaruhi keluarganya untuk mendukung salah satu partai
2	Perempuan sebagai kaum mayoritas membuat Perempuan sering dijadikan tim sosialisasi karena biasanya perempuan lebih mudah dalam proses interaksi dengan masyarakat.	Kemampuan mempengaruhi ini sering dimanfaatkan partai untuk dijadikan sebagai tim kemenangan untuk memperoleh masa.
3	Mayoritasnya perempuan banyak dijadikan sebagai objek politik.	Banyaknya jumlah kaum perempuan dari pada laki-laki mengakibatkan perempuan lebih cenderung sering dijadikan objek politik baik dalam mendulang suara maupun sosialisasi dalam

	perpolitikan.
--	---------------

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

Perempuan sebagai kaum mayoritas dimana suara terbanyak dipegang oleh kaum perempuan sehingga lebih mudah dipengaruhi dan sering dijadikan tim sosialisasi dalam proses interaksi baik didalam partai maupun pemerintahan. Kemampuan inilah yang dimanfaatkan partai untuk dijadikan tim kemenangan untuk memperoleh massa serta suara untuk para kandidat. Kedudukan perempuan sangat penting sebab mereka adalah bagian terbesar dari pemilih, kekuatan emosional perempuan menjadi peluang bagi partai politik untuk memenangkan calon mereka. Partai politik yang bisa mengelola dukungan perempuan pasti bisa memenangi pemilu. Terkait dengan pemilihan perempuan, tak sepatasnya mereka hanya menjadi lumbung suara demi jalan mulus bagi para kandidat memperoleh kemenangan dalam pemilu.

4. Kondisi Masyarakat yang Masih Patriarki

Berikut disajikan matriks Minimnya Pendidikan Politik Perempuan yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya

Tabel 2. Minimnya Pendidikan Politik Perempuan di Aceh Barat dan Nagan Raya

No	Kondisi Masyarakat yang Masih Patriarki	Keterangan
1	Laki-laki yang masih dianggap sebagai otoritas utama dalam mengontrol dan mengarahkan sesuatu hal seperti perempuan, anak-anak dan harta benda. Hal ini menyebabkan perempuan belum mendapatkan kepercayaan dalam memegang sebuah kekuasaan, sehingga sampai saat ini hanya sebagian kecil perempuan yang ingin terlibat dalam perpolitikan.	Dalam aspek kehidupan sosial masyarakat kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, masih menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga perempuan belum mendapatkan kepercayaan dalam memegang sebuah kekuasaan dan hanya sebagian kecil perempuan yang ingin terlibat dalam perpolitikan.
2	Paham masyarakat dalam kehidupan sosial khususnya di masyarakat Aceh Barat dan Nagan Raya yang mayoritas muslim masih kental akan agama dan budayanya yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial khususnya dalam hal memimpin, sehingga tidak salah jika perempuan hanya dijadikan sebagai objek belaka dalam mendukung atau mendulang suara untuk kepentingan elit politik, khususnya para kaum laki-laki.	Perempuan hanya dijadikan objek politik dalam mendukung atau mendulang suara untuk kepentingan kaum elit politik.

(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN BUDAYA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK POLITIK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA

1. Perbandingan Aceh Barat dan Nagan Raya

Perbandingan budaya perempuan sebagai objek politik antara kabupaten aceh barat dan nagan raya menunjukkan bahwasanya gairah untuk berpolitik secara spontan nagan raya lebih mudah untuk dijadikan sebagai objek politik karena para kaum perempuan di nagan raya menjalankan komunikasi politiknya lebih maju dan amat sering dilakukan pada acara tertentu, sehingga di nagan raya pertarungan politik dapat menghilangkan rasa persaudaraan sejenak ketika pemilu, sehingga di nagan raya politikus berpendapat bahwa jika pendukungnya di dominasi kaum perempuan bahwa sangat mudah untuk memenangi pertarungan politik ketika pemilu berlangsung, sedangkan di Aceh Barat kaum perempuannya secara sadar dalam perpolitikan sehingga mereka dapat memilih salah satu kandidat yang dapat mengunggulkannya atau mereka mampu melihat kedepannya dari perpolitikan tersebut dan tidak jarang pula para kaum perempuan di aceh barat termakan dengan janji-janji kandidat ketika mereka termakan dengan

janji dan angin syurga dari kandidat maka mereka melekat dan ingin menyuarakannya dalam menggalang suara dan mereka sangat sulit untuk berpaling dari satu ke yang lain, sehingga pada saat ini para politikus menganggap suara perempuan lebih terarah dari pada lelaki sehingga mereka sangat mudah untuk di jadikan sebagai objek politik.

2. Jumlah Pemilih Kaum Perempuan dan Kaum Laki-Laki di Aceh Barat dan Nagan Raya.

Pemilih kaum perempuan dari setiap periode pemilihan mengalami peningkatan dimana di kabupaten aceh barat kaum perempuan lebih dominan, disamping itu tingkat partisipasi politik dalam mendulang suara kaum perempuan lebih mudah dipengaruhi dan mempengaruhi pemilih lain, begitu pula di kabupaten nagan raya yang lebih dominan pemilih dari kaum perempuan. Berikut disajikan tabel jumlah pemilih kaum perempuan dan laki-laki di kabupaten aceh barat dan nagan raya:

No	Kabupaten	Pemilih	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Aceh Barat	65.385	65.983
2	Nagan Raya	58.480	60.454

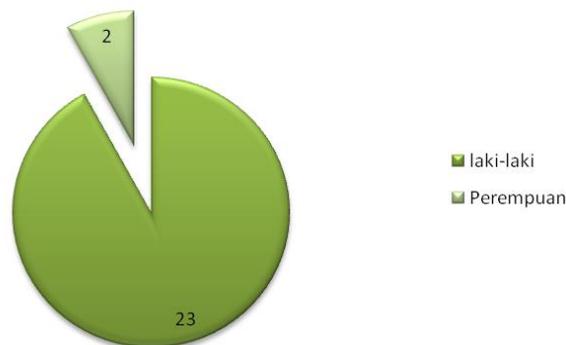
(sumber: KIP Aceh Barat dan Nagan Raya, 2017)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemilih di kedua kabupaten lebih dominan kaum perempuan. Hal inilah yang mempermudah partai politik dalam mendulang suara karena kaum perempuan lebih menggunakan perasaannya sehingga lebih mudah dipengaruhi dan mempengaruhi pemilih lain, suara kaum perempuan juga sulit berubah-ubah dan konsisten.

3. Persentase Kaum Perempuan dalam Parlemen di Nagan Raya dan Aceh Barat

Persentase perempuan dalam parlemen di kabupaten aceh barat dimana dari 25 kursi anggota parlemen para kaum perempuan hanya mendapatkan sebanyak 2 kursi, sedangkan di kabupaten nagan raya para kaum perempuan mendapatkan 3 kursi dari 25 kursi di parlemen, tetapi para kaum perempuan di parlemen sangat-sangat berkompeten, dimana para perempuan ini dapat menyuarakan suara perempuan di parlemen dan kelemahannya ialah mereka di sokong untuk mengikuti kehendak partai dan mereka tidak sepenuhnya dan sekuat para kaum lelaki. Berikut disajikan persentase perempuan dan laki-laki di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.

Grafik 1. Perbandingan Kaum Perempuan dan Laki-Laki di Parlemen Kabupaten Aceh Barat



Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 menegaskan bahwa keterwakilan perempuan untuk partai politik dan lembaga legislatif sebanyak 30%. Namun jika dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi kuota, dari 30% tersebut hanya mendapatkan 2 kursi parlemen di kabupaten Aceh Barat.

Grafik 2. Perbandingan Kaum Perempuan Dan Laki-Laki di Parlemen Kabupaten Nagan Raya



Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 menegaskan bahwa keterwakilan perempuan untuk partai politik dan lembaga legislatif sebanyak 30%. Namun jika dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi kuota, dari 30% tersebut hanya 3 kursi parlemen di kabupaten Nagan Raya.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya perempuan selalu dijadikan sebagai objek politik dalam mencari dukungan untuk mendapatkan kekuasaan berdasarkan parameter Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Komunikasi Politik dan Budaya Politik.
2. Faktor-faktor penyebab kaum perempuan sebagai objek politik di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya adalah: *Money Politic* dan Kemiskinan, Minimnya Pendidikan Politik, Perempuan Sebagai Kaum Mayoritas serta Kondisi Masyarakat yang Masih Patriarki.
3. Jumlah kaum perempuan di Parlemen Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kaum laki-laki.

b. Saran

1. Perlunya revitalisasi lembaga partai dalam hal penempatan kaum perempuan yang sifatnya fungsional dan bertanggungjawab dalam menyuarakan suara kaum perempuan sebagai kaum mayoritas.
2. Adanya pendidikan politik secara komprehensif terhadap kaum perempuan dalam meningkatkan pengetahuannya di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.
3. Adanya kesetaraan hak dalam berpolitik antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga kaum perempuan tidak terus menerus dijadikan sebagai objek politik.
4. Adanya keseimbangan proporsional dalam penempatan kaum perempuan di parlemen maupun lembaga politik lainnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Nimrah S dan Sakaria (2015) Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1 Nomor 2 July 2015. P-ISSN: 2407-9138.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.